

# Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

**Ikramullah, Akhmad Sirojuddin**

<sup>1</sup>*Pascasarjana Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim Pacet Mojokerto*  
e-mail: kamirulloh888@gmail.com

Submitted: 06-07-2020

Revised : 17-08-2020

Accepted: 07-09-2020

**ABSTRACT.** Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen sekolah dalam menerapkan pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian atau informannya adalah kepala sekolah, guru kelas/walikelas dan guru pembimbing khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dalam hal pengoptimalan pengelolaan pendidikan inklusi, peran kepala sekolah sebagai pemegang keputusan tertinggi di suatu lembaga sangat memengaruhi arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut. (2) Ada banyak faktor penghambat terhadap pengelolaan pendidikan inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto dari awal pengelolaan sampai dengan sekarang. Namun, faktor yang paling mendasar dan sangat memengaruhi adalah permasalahan yang berhubungan dengan anggaran. (3) Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah membagi dan memprioritaskan masalah yang memang tidak bisa diselesaikan oleh SDN Mentikan 1 sendiri kemudian menjadikannya bahan aduan ke Dinas terkait dan pusat sumber yang bertempat di SLB Pertiwi yang kebetulan ditunjuk langsung oleh dinas pendidikan provinsi jawa timur sebagai sekolah aduan terkait pengelolaan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

**Keywords:** *Manajemen Sekolah, Pendidikan Inklusi, Sekolah Dasar*



https:

**How to Cite**

Ikramullah, Sirojuddin, A. (2020). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131-139.

## PENDAHULUAN

Penelitian kualitatif sebagaimana penelitian ini berupaya menggali keterangan atau informasi sedalam-dalamnya kepada informan di lapangan berkaitan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karenanya, menangkap permasalahan atau problem yang terjadi di lapangan dianggap unik, penting dan menarik. Bila problem dapat ditangkap, maka setelahnya layak untuk diajukan sebagai pertanyaan penelitian.

Problematika yang diperoleh dari dunia empiris itulah yang menentukan apakah penelitian dianggap layak untuk dilanjutkan hingga mencapai jawaban yang sebagaimana diungkap pada tujuan dan manfaat sebuah penelitian. Pada langkah awal, peneliti wajib melakukan observasi awal dalam rangka menangkap masalah. Tangkapan itu harus memuat alasan penting dan menariknya, urgen dan mendesaknya, serta unik di mana di lokasi lain sulit ditemukan masalah seperti itu.

Pada observasi awal, sesuai dengan program studi yang diampu oleh peneliti, peneliti menemukan aspek pengelolaan pada lembaga pendidikan. Manajemen atau pengelolaan sebuah

sekolah menentukan keberhasilan capaian mutu dan kualitasnya. Meneliti tentang pengelolaan atau manajemen sekolah mendesak dilakukan karena alasan urgensi dan mendesaknya pencapaian kualitas sekolah yang bersangkutan. Ini adalah yang mendasari penelitian ini dari aspek urgensinya.

Selanjutnya, setelah mengungkap alasan mendesaknya penelitian pada topik manajemen sekolah, maka peneliti beranjak menelusuri menariknya penelitian ini. Ini artinya peneliti harus meninjau problematika utama yang harus diatasi oleh manajemen sekolah. Fokus peneliti tertuju kepada penerapan pendidikan inklusi yang sejatinya memiliki poin krusial, di mana topik ini memiliki kekhasan dalam tema dan bahasan, yakni mengungkap eksistensi dan esensi penerapannya pada sebuah sekolah dengan segala hambatannya, yang harus diatasi melalui pengelolaan yang efektif dan efisien. Inilah yang melatari alasan menariknya penelitian ini untuk dilakukan dan dikembangkan demi capaian kualitas pendidikan.

Setelah tahap mengungkap mendesak dan menariknya penelitian ini, tibalah pada ungkapan alasan uniknya penelitian ini. Secara logis dapat dijabarkan bahwa penelitian ini dilakukan di sekolah yang memberlakukan penerapan pendidikan inklusi, dan pilihan jatuh pada Sekolah Dasar Negeri Mentikan 1 Kota Mojokerto. Dipilihnya sekolah ini karena memang jarang ada sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi semacam ini. Inilah yang melatari uniknya penelitian ini.

Kita semua tahu bahwa Pendidikan adalah kebutuhan yang paling vital/penting untuk manusia agar mendapatkan dan memudahkan serta dengan pendidikanlah kita bisa dan mudah untuk saling membantu sesama makhluk terutama makhluk yang bernama manusia. Dengan pengetahuanlah kita membangun komunikasi dengan lingkungan sekitar dan dari hal itu akan terlahir ide, gagasan dan kesadaran. Maka dari itu tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memberikan kesempatan mengenyam pendidikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas apapun latar belakang warga Negara termasuk mereka yang mempunyai kemampuan khusus.

Perihal pendidikan, pemerintah bukan cuma mendahulukan peserta didik yang memiliki kemampuan seperti pelajar pada umumnya dan apalagi memprioritaskan peserta didik golongan darah biru, tetapi harus memprioritaskan pula anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan menengah ke bawah, dianggap berkelainan atau memiliki kebutuhan khusus dari anak-anak pada umumnya. Sesuai yang tertuang dalam UUD pasal 31 Ayat 1 “ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak-anak di luar sana terutama anak berkebutuhan khusus yang tidak atau menyentuh pendidikan meski sedikit pun. Mengapa demikian? Apakah anak berkebutuhan khusus bukan warga Negara yang wajib menerima pendidikan seperti yang termaktub dalam UUD Pasal 31 ayat 1? Lantas solusi apa yang sudah ditawarkan pemerintah untuk permasalahan seperti itu.

Ini sebenarnya bukan problem yang baru saja terjadi tetapi sudah ada sejak lama dan berbagai macam solusi dari pemerintah sudah diterapkan. Sekolah Luar Biasa atau biasa disingkat SLB misalnya. Hampir di tiap ibu kota kabupaten memiliki SLB, namun yang jadi permasalahan dari SLB adalah keberadaannya yang cuma ada di Ibu Kota Kabupaten. Saya ambil contoh di daerah saya, Kec. Turatea, Kab. Jenepono. Banyak anak berkebutuhan khusus yang berada dipelosok desa yang belum terjamah pendidikan sama sekali. Bukan tidak mau menyekolahkan anak di sekolah luar biasa namun selain sekolahnya yang jauh, kebanyakan orang tua tidak mampu membiayai anaknya dan sudah acuh dengan pendidikan karena merasa kondisi anaknya yang tidak memungkinkan untuk memperoleh pendidikan yang dimaksud.

Kemudian pemerintah kembali menawarkan solusi untuk permasalahan itu, Pendidikan Inklusi namanya. Penerapan pendidikan inklusi di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penerapan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus atau memiliki kecerdasan

yang berbeda dengan anak pada umumnya dilaksanakan secara inklusi atau bisa juga sekolah khusus, tentunya dengan SOP tersendiri. Maka dari itu pendidikan inklusi semaksimal mungkin dapat segera disatukan dengan pendidikan formal atau reguler. Dengan berkilat dari landasan hukum tersebut, sekolah umum tidak ada alasan untuk menolak anak berkebutuhan khusus untuk ikut belajar di sekolah reguler.

Mereka berhak memperoleh pendidikan, jenis pendidikannya disebut pendidikan khusus. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 32 ayat (1) tentang sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Penyelenggara pendidikan berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan formal dan kejuruan diselenggarakan secara inklusif. Kenyataan seperti ini berarti telah terjadi perubahan mendasar dalam dunia Pendidikan Luar Biasa di Indonesia yang kemudian namanya berubah menjadi Pendidikan Khusus. Istilah pendidikan khusus sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Pendidikan inklusi membawa perubahan mendasar dalam bidang pendidikan, perubahan tersebut yaitu adanya peralihan landasan berpikir dari pendidikan beralih kependidikan kebutuhan khusus, hal ini berarti telah terjadi perubahan dalam kesadaran dan kesiapan para perencana praktisi pendidikan, keadaan, metodologi, penggunaan konsep-konsep terkait misalnya konsep anak berkebutuhan khusus (ABK) atau peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), dan sebagainya.

Konsep anak berkebutuhan khusus mempunyai arti dan makna yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendidikan anak luar biasa (Zulaikhah et al., 2020). Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan layanan pendidikan lebih spesifik yang tidak sama dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki kelebihan yang sering disebut dengan kesulitan khusus baik dalam hal belajar ataupun perkembangan. Jadi karena itulah mereka perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus atau hambatan tiap peserta didik (Abdurrohman & Syamsiar, 2017; Wathoni, 2013).

Dengan beragamnya karakteristik peserta didik di sekolah umum, maka sekolah harus dapat mengontrol semua peserta didik terkhusus anak berkebutuhan khusus. Lembaga yang ingin mengelola atau menerima anak dengan kebutuhan khusus harus mempunyai komitmen tinggi sebagai warga lembaga untuk proaktif inklusi kemudian diikuti dengan mengelola pendidikan inklusi secara profesional dan mengembangkan pendidikan inklusi dengan niat mencapai tujuan pendidikan itu sendiri (Sumarni Sumarni, 2019).

Namun untuk mencapai cita-cita tersebut dibutuhkan optimalisasi dari setiap perangkat sekolah dan pengelolaan manajemen yang baik dan efektif. Dalam hal ini manajemen berperan sebagai jalur kemudahan mencapai visi misi dari lembaga sekolah (Bahri & Arifah, 2020; Fadhillah, 2016). Dimulai dari *planning, orginazing, actuating, controlling and evaluating*. Penting pula peran aktif dari para struktural lembaga dan pemanfaatan/pemberdayaan sumber-sumber daya organisasi agar supaya dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Tajudin & Aprilianto, 2020). Dengan manajemen sekolah yang baik, sekolah akan mampu menciptakan program-program yang lebih baik karena pemikiran sumber daya sekolah dapat diolah secara langsung sesuai dengan kebutuhan murid (Matwaya & Zahro, 2020; Ridwan, 2018).

Dalam peningkatan kualitas pembelajaran, profesionalitas menjadi salah satu acuan fundamental untuk merealisasikan nuansa pembelajaran yang didambakan oleh peserta didik (Hasanah, 2020; Ma`arif & Kartiko, 2018). Dengan demikian nanti akan tercipta kualitas peserta didik yang memadai untuk peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan. Harapan ini sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Sebab secara faktual, paradigma pendidikan nasional dalam dekade terakhir ini hanya terfokus pada peran sentral seorang guru. Peserta didik dalam hal ini hanya menjadi penonton yang setia menyimak dan menyaksikan apa yang dijelaskan guru.

Sekolah Dasar Negeri Mentikan 1 Kota Mojokerto adalah satu dari sekian lembaga pendidikan dasar yang menerapkan program inklusi atau pendidikan bagi peserta didik difabel di Mojokerto. Kurang lebih tujuh tahun lamanya sekolah tersebut menerapkan pendidikan inklusi. Bukan hal yang mudah menerapkan pendidikan inklusi, dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang bisa mensinergikan antara siswa normal dan anak berkebutuhan khusus agar bisa membaaur bersama tanpa adanya diskriminatif dari siswa lainnya.

Maka dari itu, penerapan pendidikan inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto yang terbilang sudah sangat berkualitas karena sudah banyak peserta didiknya terutama peserta didik berkebutuhan khusus memenangkan beberapa lomba baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Karena pengelolaannya yang terbilang efektif dan efisiensi maka perlu dijadikan cerminan dan wajib bagi peneliti untuk mendalami dan mencari tahu seperti apa penerapan dan pengelolaan program pendidikan inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto terutama pada penyusunan kurikulum, pengelolaan sarana prasarana dan cara membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat atau orang tua peserta didik. Karena ini dihitung sangat penting untuk dijadikan bahan pelajaran dan modal bagi generasi yang peduli pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus pada umumnya dan peneliti pada khususnya.

Berangkat dari permasalahan yang sudah dituangkan diatas, peneliti merasa ingin mendalami dan lebih tahu tentang sekolah yang bersangkutan dengan mengambil judul "Optimalisasi Manajemen Sekolah dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Menurut Moleong (Lexy J, 2011) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara memahamai fakta yang terjadi pada subyek penelitian misalnya situasi, kondisi, kebijakan, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena sumber informasi berupa perkataan dan tindakan individu yang diwawancarai atau diamati di SDN Mentikan 1 Kota. Oleh karena itu penelitian ini digolongkan dalam penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrument pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan sebagainya (Emzir, 2010; Suharsimi, 2010). Peneliti memilih SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto sebagai tempat penelitian. Waktu Penelitian yaitu Mei–Juni 2020 adalah waktu pelaksanaan penelitian. Kegiatan meneliti meliputi, pengumpulan data dan penyusunan laporan hasil penelitian.

Teknik memperoleh data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data mengikuti model Hubberman (Miles et al., 2014) yaitu: Reduksi data: setelah wawancara dengan informan data dilakukan reduksi agar data yang kurang relevan tersaring dengan baik. Penyajian data dan penarikan kesimpulan terhadap hasil yang dilakukan. Teknik pengecekan kesahan informasi ialah cara untuk memastikan mutu informasi riset (Creswell, 2007). Cara itu dicoba dengan metode pengecekan informasi mengenai upaya periset dalam mendapatkan serta menganalisa informasi. Teknik menggapai kesahan ataupun integritas informasi dilakukan dengan cara triangulasi ialah cara pengetesan integritas melalui pengecekan informasi dari bermacam teknik, pangkal serta durasi informasi didapat. Teknik triangulasi yang dicoba dalam riset ini merupakan triangulasi metode dengan mencoba integritas lewat cara pengecekan pada pangkal informasi yang serupa dengan metode yang berlainan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Selanjutnya akan disajikan hasil identifikasi dari data yang telah diterima sebelumnya seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak terkait yang diuraikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu: (1) pengelolaan pendidikan inklusi; (2) penghambat pengelolaan penyelenggara pendidikan inklusi; dan (3) upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menerapkan pendidikan inklusi.

### **Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi**

Sekolah Dasar Negeri Mentikan 1 Kota Mojokerto merupakan 1 dari 4 sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi di kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Sejak 2013 silam sekolah tersebut didefinisikan sebagai sekolah inklusi oleh pemerintah kota Mojokerto dalam hal ini Jenderal Pendidikan Khusus Kota Mojokerto meski sebenarnya sebelum ditunjuk menjadi sekolah inklusi, sekolah tersebut sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Bukan tanpa dasar sekolah tersebut berani menerapkan pendidikan inklusi, tetapi bagian dari keprihatinan kepala sekolah saat itu dan beberapa guru terhadap anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan pendidikan.

Dalam penerapannya, memang untuk mencapai pendidikan inklusi yang optimal dibutuhkan kerja kolektif antara pendidik dan tenaga kependidikan. Butuh perencanaan yang matang, pengorganisasian yang sesuai, pengarahan yang baik dan pengawasan intens dari pihak-pihak terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan masyarakat setempat. Dalam hal pengoptimalan pengelolaan pendidikan inklusi, peran kepala sekolah sebagai pemegang keputusan tertinggi di suatu lembaga sangat mempengaruhi visi dan misi yang hendak dicapai oleh sekolah tersebut. Komunikasi yang efektif antara manajer lembaga (kepala sekolah), pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat akan berdampak baik pada tata kelola pendidikan inklusi. Dan juga kualitas SDM dan sarana prasarana yang mumpuni sangat menunjang keberhasilan pengelolaan pendidikan inklusi.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya yang paling menunjang keberhasilan pengelolaan program sekolah adalah ketersediaan SDM yang mumpuni, sarana prasarana sebagai penunjang dan dukungan dari masyarakat/orang tua peserta didik.

Karena siswanya memiliki kecerdasan khusus dan bakat istimewa, maka idealnya sekolahpun melakukan hal-hal istimewa, seperti membangun sinergitas antara lembaga sekolah dan pihak pemerintah terutama dinas pendidikan setempat. Sekolah dan pemerintah kabupaten kota harus seintens mungkin membangun komunikasi yang baik demi terciptanya pendidikan inklusi yang mengacu kepada Undang-undang No. 20 tahun 2003 sisdiknas pasal 1 “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, masyarakat, bangsa dan Negara.

### **Penghambat Pengelolaan Pendidikan Inklusi**

#### **Tahap Pengorganisasi Pendidikan Inklusi**

Setiap penerapan pengelolaan selalu diikuti oleh munculnya kendala dan hambatan. Tidak terkecuali pada manajemen sekolah dalam mengelola pendidikan inklusi, selalu muncul dan mengemuka, namun itu adalah hal yang wajar. Kepala sekolah sebagai penanggungjawab sebuah sekolah adalah seorang manajer yang memiliki wewenang, tugas, tanggungjawab bagi keberhasilan sebuah program pengelolaan.

Pada konteks penerapan pendidikan inklusi di SDN Mentikan 1 Mojokerto, ditemukan informasi dan amatan bahwa ketersediaan guru pendamping dirasa belum cukup dan itu akan

menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan guru pendamping khusus, Kemendikbud RI pada pedoman penyelenggaraan kurikulum untuk PDBK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dikatakan bahwa jumlah guru pembimbing khusus yang wajib disiapkan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yang menyediakan kelas khusus menggunakan rasio Guru Pembimbing Khusus : Peserta Didik Berkebutuhan Khusus = 1:5, dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya 1 guru pembimbing khusus hanya melayani maksimal 5 peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan amatan pada tahap perencanaan, peneliti menganggap bahwa Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memiliki kualifikasi dan berkompotensi masih kurang, keberadaan guru pendamping khusus merupakan kebutuhan mendasar dan harus disediakan. Untuk konteks sekolah dasar, ketersediaan guru pendamping kelas menjadi esensi kendala yang terjadi di mana-mana bagi penyelenggara pendidikan inklusi.

Ini merupakan alasan manajerial, dan kepala sekolah yang harus mempertanggungjawabkannya. Meski anggaran atau pembiayaan menjadi alasan utama di hampir semua sekolah negeri, namun amanat undang-undang dasar mengatakan bahwasanya pendidikan adalah hak setiap warga Negara, maka harus muncul upaya internal untuk mengatasi segala kendala dan hambatan itu.

### **Tahap Pengarahan Pendidikan Inklusi**

Amatan di lapangan pada pelaksanaan penerapan pendidikan inklusi di SDN Mentikan 1 Mojokerto mengalami sedikit kesulitan pada proses pembelajarannya. Ini menjadi bukti bahwa betapa sulitnya mengelola pelaksanaan pendidikan inklusi. Kesulitan itu muncul dikarenakan stimuli dari peserta didik ABK ini beragam dan membutuhkan perhatian dan penanganan yang jeli dan teliti. Menangani satu peserta didik ABK pada pendidikan inklusi sama beratnya dengan menangani satu kelas pada peserta didik biasa atau reguler.

Kesulitan itu bisa dari aspek komunikasi, aspek transfer pengetahuan atau aspek memberikan ketahanan dalam fokus kepada proses pembelajaran. Faktor *endurance* ini memang menjadi masalah khusus, dan kare nanyalah peserta didik seperti ini disebut anak berkebutuhan khusus. Dan yang paling krusial pada penerapan pendidikan inklusi ini adalah kompetensi kepribadian guru pendamping yang sering keluar dari keharusan untuk bersabar. Kesabaran yang harus diekspresikan pada saat proses pembelajaran sering mandeg karena faktor kelelahan dan berkurangnya fokus guru pendamping dalam menjalani proses belajar mengajar (Arikarani, 2019). Dan, yang paling menghambat adalah faktor orangtua yang selalu menganggap bahwa perkembangan anaknya menjadi tanggungjawab sepenuhnya guru di dalam kelas. Penyerahan secara membabi buta ini sering mengendala, tuntutan kepada guru pendamping dari orangtua ini sekali-kali menurunkan semangat dan konsentrasi guru pendamping. Pemahaman yang memadai perihal kondisi anak berkebutuhan khusus pada diri orang tua disertai dengan harapan yang terlampau tinggi perihal anaknya sejurus menjadi kendala. Dan berdasarkan amatan di lapangan, posisi orangtua sebagai single parent selalu melahirkan hambatan yang menyulitkan guru pendamping dalam proses pendidikan inklusi di dalam kelas. Dari pihak siswanya, beragam dan berbedanya model pelajar yang memiliki kebutuhan khusus ini seolah menyiratkan penanganan satu lawan satu. Artinya, bila di dalam kelas ada dua peserta didik berkebutuhan khusus, maka hakekatnya harus ada tiga guru di dalam kelas, yakni satu guru kelas reguler dan dua guru pendamping anak berkebutuhan khusus itu. Persoalan bisa berlebih bila tidak ada kuota jumlah anak berkebutuhan khusus di tiap kelasnya.

Makin banyak maka akan menambah beban guru pendamping. Berdasarkan amatan di lapangan, kondisi anak berkebutuhan khususnya di tiap kelas rata-rata memiliki keterlambatan dalam belajar. Kondisi ini sepertinya sepele, namun memiliki persoalan yang berat dan menentukan keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan inklusi di dalam kelasnya.

## **Tahap Pengawasan Pendidikan Inklusi**

Pada tahap pengawasan, oleh karena hambatan pada tahap perencanaan dan pengarahan, maka logis bila muncul hambatan pada sesi pengawasannya. Sinergitas antara lembaga sekolah dan pihak birokrasi adalah hal yang paling sensitif untuk mengelola pendidikan inklusi. Pihak sekolah dan pemerintah kota ataupun provinsi harus seintens mungkin membangun komunikasi demi tercapainya tujuan pendidikan inklusi yang mengacu kepada Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2003, Sisdiknas Pasal 1 ayat 1: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Dengan maksud agar kepala sekolah dan para guru pendamping bisa melihat seberapa efektif dan efisien pelaksanaan sudahkah berdasarkan perencanaannya. Hambatan pada perencanaan, pengarahan dan pelaksanaan memberikan kurang optimalnya pengawasannya. Kelemahan di aspek perencanaan yang sudah disebutkan di atas, berikut kendala di aspek pengarahannya, menyulitkan bagi capaian optimalisasi hasil (Juran, 1992). Oleh karenanya, keterbatasan pelaporan administratif guru pendamping, karena disibukkan oleh sesi pembelajaran di dalam kelas, menyebabkan aspek evaluasi mengalami keterlambatan atau bahkan mengalami keterlepasan, di mana evaluasi yang dilakukan asal-asalan, yakni asal jadi dan asal bisa dilaporkan.

Ujung-ujungnya adalah merujuk pada aspek budgeting atau pembiayaan yang kurang memadai pada proses penerapan pendidikan inklusi di dalam sekolah ini. Meski sudah menjalani pelatihan dalam pengelolaan kelas inklusi, namun tetap saja memunculkan kendala dan hambatan yang kadang kala muncul dalam penerapan dan pengawasannya.

## **Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Pengelolaan Pendidikan Inklusi**

Berdasarkan kendala dan hambatan yang secara inheren selalu mengemuka pada penerapan pendidikan inklusi, maka manajemen sekolah yang digawangi oleh kepala sekolah di SDN Mentikan 1 Mojokerto ini harus melihat dan mencari langkah solutif yang tentunya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Beberapa aspek solutif ini wajib diselenggarakan oleh pengelola sekolah, tentunya dengan optimalisasi penyesuaian dengan memperhatikan beberapa hal yakni : surat legalitas; struktur organisasi sekolah; sosialisasi; perencanaan; koordinasi; dan pengendalian. Pada dimensi ini, manajemen sekolah belum optimal, yang sudah terealisasi hanyalah legalitas dan peyediaan struktur sekolah yang masih di atas kertas belaka.

Untuk perencanaan, koordinasi dan pengendalian belum optimal. Satu-satunya solusi adalah memperkuat optimalisasi pengelolaan oleh kepala sekolah. Tanpa keterlibatan kepala sekolah dan pihak dinas terkait secara manajerial, maka semua penerapan pendidikan inklusi hanyalah sebatas nama saja di papan nama sekolah. Ini menjadi hal krusial untuk langkah solutifnya selain mengoptimalkan perencanaan.

Pada dimensi kurikulum, apa yang terjadi berjalan di tempat saja. Ini mendorong pengelola dan guru pendamping sebagai panglima di dalam proses pembelajaran harus berpikir keras agar pelaksanaan kurikulum berjalan dengan baik. Sudah jamak di manapun penyelenggara pendidikan inklusi, apapun inovasi dan kreativitas guru pendamping, bila sudah berhadapan dengan peserta didik berkebutuhan khusus, maka semuanya akan buyar dan kembali lagi, kesabaran menjadi pertarungan keberhasilan. Anak berkebutuhan khusus bisa tenang dan diam di dalam kelas adalah prestasi (Abidin, 2014; Maarif & Rofiq, 2018).

Tentang pendidik dan tenaga kependidikan, mencakup empat dasar gerak, yaitu: kualifikasi dan kompetensi; komitmen; keberadaan guru pembimbing khusus; dan keberadaan tenaga terapis atau ahli lain. Ihwal ini juga mengalami keterbatasan dan harus disolusi dengan bijak oleh kepala

madrasah. Keterbatasan anggaran sekali lagi menjadi faktor penentu keberhasilan pengambilan solusi. Sejauh ini, kepala sekolah belum bisa optimal, namun tetap ada solusi yakni tetap meng-upgrade kompetensi guru pendamping yang diambilkan dari guru honorer yang diberi ketrampilan mendampingi kelas inklusi.

Kalau sarana dan prasarana sekolah, mencakup empat dasar petunjuk, yaitu: keberadaan kelas khusus; sarana pembelajaran; aksesibilitas fisik; dan perpustakaan. Perihal pembiayaan, mencakup tiga indikator, yaitu: alokasi pembiayaan; dukungan pembiayaan; dan laporan penggunaan dana. Dimensi sarana prasarana dan pembiayaan menjadi satu kesatuan, karena keduanya berkaitan erat. Oleh karenanya, kepala sekolah mensolusinya sebatas pada pengajuan anggaran tambahan agar pengelolaan kelas inklusi ini bisa optimal. Itupun harus menunggu tahun anggaran berikutnya, di samping harus menunggu urutan penerimaan bantuan anggaran (Muslimin & Kartiko, 2020).

Solusi penerapan pendidikan inklusi pada manajemen sekolah sesungguhnya berpulang kepada aktivasi kepala sekolah dan guru pendamping kelas dengan melibatkan perhatian orangtua murid, yang dengan sinergi ini, maka pengelolaannya bisa optimal dan berdaya guna, efektif dan efisien.

## **KESIMPULAN**

Dalam hal pengoptimalan pengelolaan pendidikan inklusi, peran kepala sekolah sebagai pemegang keputusan tertinggi di suatu lembaga sangat memengaruhi arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut. Komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, guru kelas, guru pembimbing khusus dan masyarakat akan berdampak baik pada tata kelola pendidikan inklusi. Dan juga kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana sangat menunjang keberhasilan pengelolaan pendidikan inklusi.

Setiap penerapan pengelolaan program selalu diikuti oleh kendala dan hambatan. Tidak terkecuali pengelolaan inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto. Ada banyak faktor penghambat terhadap pengelolaan pendidikan inklusi di SDN Mentikan 1 Kota Mojokerto dari awal pengelolaan sampai dengan sekarang. Namun, faktor yang paling mendasar dan sangat memengaruhi adalah permasalahan yang berhubungan dengan anggaran.

Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah membagi dan memprioritaskan masalah yang memang tidak bisa diselesaikan oleh SDN Mentikan 1 sendiri kemudian menjadikannya bahan aduan ke Dinas terkait dan pusat sumber yang bertempat di SLB Pertiwi yang kebetulan ditunjuk langsung oleh dinas pendidikan provinsi Jawa timur sebagai sekolah aduan terkait pengelolaan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

## **REFERENSI**

- Abdurrohman, A., & Syamsiar, H. (2017). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Model Keberagaman Inklusif untuk Mencegah Radikalisme Beragama Dikalangan Siswa SMA. *FENOMENA*, 9(1), 105–122. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.789>
- Abidin, Y. (2014). *Desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013* (Cetakan kesatu). Refika Aditama.
- Arikarani, Y. (2019). Analisis Eduitainment Dan Brain Based Learning Perspektif Psikologi Pembelajaran Pai Dan Agama. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 14(1), 125–156. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i1.4915>
- Bahri, S., & Arafah, N. (2020). Analisis Manajemen SDM Dalam Mengembangkan Strategi Pembelajaran Di Era New Normal. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 1(1), 20–40. <https://doi.org/10.31538/tjje.v1i1.2>



- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (2nd ed). Sage Publications.
- Emzir. (2010). *Analisis data: Metodologi penelitian kualitatif*. Rajawali Pers.
- Fadhillah, K. (2016). Manajemen Mutu Pendidikan Islam di Pesantren (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor). *At-Ta'dib*, 10(1).
- Hasanah, M. (2020). Rekrutmen Dan Seleksi Tenaga Pendidikan (Guru) Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMA Unggulan Berbasis Pesantren Amanatul Ummah Pacet. *Al-Tarbawi Al-Haditsab: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v5i1.6310>
- Juran, J. M. (1992). *Juran on quality by design: The new steps for planning quality into goods and services*. Free Press ; Maxwell Macmillan Canada ; Maxwell Macmillan International.
- Lexy J, M. (2011). *Metodologi penelitian Kualitatif* (29th ed.). Rosdakarya.
- Ma'arif, M. A., & Kartiko, A. (2018). Fenomenologi Hukuman di Pesantren: Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik. *Nadwa*, 12(1), 181–196. <https://doi.org/10.21580/nw.2018.12.1.1862>
- Maarif, M. A., & Rofiq, M. H. (2018). *Pola Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren Berkarakter: Studi Implementasi Pendidikan Berkarakter di Pondok Pesantren Nurul Ummah Mojokerto*. 13, 16.
- Matwaya, A. M., & Zahro, A. (2020). Konsep Spiritual Quotient Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(2), 41–48. <http://www.jurnal.staidagresik.ac.id/index.php/attadrib/article/view/112>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Muslimin, T. A., & Kartiko, A. (2020). Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah Bertaraf Internasional Nurul Ummah Pacet Mojokerto. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 75–87. <https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/30>
- Ridwan, M. (2018). Konsep Tarbiyah, Ta'lim Dan Ta'dib Dalam Al-Qur'an. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 35–57. <https://doi.org/10.31538/nzh.v1i1.41>
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (14th ed.). Rineka Cipta.
- Sumarni Sumarni, M. S. (2019). Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.631>
- Tajudin, A., & Aprilianto, A. (2020). Strategi Kepala Madrasah..dalam Membangun Budaya Religius Peserta Didik. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 101–110. <https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/34>
- Wathoni, K. (2013). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 99–109.
- Zulaikhah, D., Sirojuddin, A., & Aprilianto, A. (2020). Analisis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013 Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 1(1), 54–71. <https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/tijie/article/view/6>